

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Data Kondisi Geografis Pesanggrahan**

Berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1251/1986 tentang pemecahan, penyatuan, dan penentuan batas wilayah, disebutkan bahwa wilayah Kelurahan Pesanggrahan terdiri dari 8 RW dan 85 RT dan setiap RW terdiri dari RT yang berbeda-beda. Luas Kelurahan Pesanggrahan ini adalah 210,25 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- utara : Kelurahan Petukangan Utara dan Kelurahan Ulujami
- selatan : Kelurahan Bintaro dan rel kereta api
- barat : Desa Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren
- timur : Desa Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren

Lokasi penelitian di Kelurahan Pesanggrahan ini merupakan salah satu wilayah pinggiran Jakarta yang masih banyak terdapat warga Betawinya.

## 2. Data Keadaan Umum Masyarakat Pesanggrahan

Berdasarkan data monografi dari Kelurahan Pesanggrahan pada bulan Januari sampai dengan April 2008, diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Ulujami adalah 26.648 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1**

### Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	14.368	53,9
Perempuan	12.276	46,1
Jumlah (N)	26.648	100%

*Sumber: Data Monografi Kel. Pesanggrahan, Januari-April 2008*

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan, yaitu sebesar 53,9%. Padahal secara umum, jumlah penduduk di wilayah Indonesia yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yang apabila diadakan perbandingan antara keduanya yaitu 1 banding 7, 1 untuk laki-laki dan 7 untuk perempuan. (Berdasarkan hasil sensus penduduk di BPS tahun 2000).

**Tabel 2****Komposisi Penduduk Menurut Agama**

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Islam	25.198 orang	94,5
Kristen	1.292 orang	4,9
Hindu	94 orang	0,3
Budha	62 orang	0,2
Jumlah (N)	26.646 orang	100 %

*Sumber: Data Monografi Kel. Pesanggrahan, Januari-April 2008*

Berdasarkan tabel 2, jumlah penduduk Kelurahan Pesanggrahan, mayoritas beragama Islam yakni 94,5 % atau sekitar 25. 198 jiwa, sedangkan mereka yang beragama Kristen sebanyak 4,9 % dan itupun terbagi atas Kristen Protestan dan Kristen Katolik, yaitu sebanyak 1.292 jiwa. 0,3% penduduk atau sekitar 94 jiwa beragama Hindu yang merupakan penduduk minoritas di Kelurahan Pesanggrahan berdasarkan agama. Sebanyak 0,2% sisanya yakni sekitar 62 jiwa beragama Budha. Jadi, Islam di Kelurahan Pesanggrahan merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Pesanggrahan. Kebudayaan Betawi yang bernuansa Islam pun masih banyak ditemui di kelurahan ini. Sebagai contohnya adalah tanjidor yang dibawakan untuk mengiringi lagu-lagu bernuansa religius/Islami.

Walaupun Islam sebagai agama mayoritas yang dianut warga Betawi di Kelurahan Pesanggrahan, hal itu tidak menghalangi mereka untuk bersosialisasi

dengan penganut agama lain. Masyarakat Betawi di Kelurahan Pesanggrahan meskipun berlainan agama tetapi hidup berdampingan secara damai.

**Tabel 3**

**Komposisi Penduduk Tingkat Pendidikan**

<b>Lulusan/Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
SD	4.217	28,8
SLTP	8.590	58,7
SLTA	1.220	8,3
Akademi (D1-D3)	279	1,9
Sarjana (S1-S3)	337	2,3
<b>Jumlah</b>	<b>14.643</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Monografi Kel. Pesanggrahan, Januari-April 2008*

Berdasarkan tabel 4, jumlah penduduk Kelurahan Pesanggrahan yang menempuh pendidikan umum sebanyak 14.643 jiwa dimana presentase terbesar adalah mereka yang lulus SLTP yakni sebanyak 58,7% atau sekitar 8.590 jiwa. Hal ini mungkin disebabkan oleh program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga banyak orangtua yang menyekolahkan anaknya hingga 9 tahun. Karena hingga tingkat SLTP tidak dipungut biaya SPP, para orangtua lebih memilih menyekolahkan anak mereka hingga tingkat SLTP saja.

Menurut wakil lurah Pesanggrahan yaitu Drs. Ahmad Ikbal, dahulu banyak warga Betawi di Kelurahan Pesanggrahan yang sekolah di pesantren atau madrasah sehingga banyak warga Betawi yang berprofesi sebagai mubaligh. Akan tetapi sekarang fenomena itu sudah berubah karena saat ini lebih banyak warga Betawi yang lebih memilih jalur pendidikan umum.

### 3. Data Responden

**Tabel 4**

**Usia Responden**

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1.	35-40 tahun	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
2.	41-45 tahun	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
3.	46-50 tahun	5	$5/24 \times 100 = 20,9\%$
4.	51-55 tahun	9	$9/24 \times 100 = 37,5\%$
5.	56-60 tahun	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
6.	61-65 tahun	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
	Jumlah	24	100%

*Sumber: Data Monografi Kel. Pesanggrahan, Januari-April 2008*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah usia 51-55 tahun. Karena pada usia ini, rata-rata responden sudah menyekolahkan anaknya sampai lebih dari 9 tahun. Selain itu, bisa juga karena pada usia tersebut banyak yang sudah tidak kuat bekerja lagi dan berada dirumah saja.

**Tabel 5****Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	11	$11/24 \times 100 = 45,8 \%$
2	Perempuan	13	$13/24 \times 100 = 54,2 \%$
	Jumlah	24	100 %

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak daripada jumlah responden laki-laki. Ini disebabkan karena komposisi penduduk dikelurahan pesanggrahan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi terdapat lebih banyak responden perempuan untuk dijadikan informan.

**Tabel 6****Jumlah Anak Responden**

No.	Jumlah Anak	Jumlah	Persentase
1	1-2	13	$12/24 \times 100 = 50 \%$
2	3-4	9	$9/24 \times 100 = 37,5 \%$
3	5-6	3	$3/24 \times 100 = 12,5 \%$
	Jumlah	24	100 %

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah anak anak terbanyak adalah jumlah anak antara 1 atau 2 anak saja. Ini membuktikan bahwa program

Keluarga Berencana dikelurahan pesanggrahan telah berhasil dengan baik. Ini didukung oleh Puskesmas yang bagus dan pada Puskesmas dikelurahan pesanggrahan dapat melayani program Keluarga Berencana dengan baik.

## B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

### 1. Persepsi terhadap Pasal 48

**Tabel 7 kognisi terhadap pasal 48**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	P
1.	Apakah saudara mengetahui tentang program wajib belajar 9 tahun?	Ya	21	$21/24 \times 100 = 87,5\%$
		Tidak	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
	Jumlah		24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 87,5 persen responden mengetahui tentang program wajib belajar 9 tahun, sedangkan sebanyak 12,5 persen tidak mengetahui program wajib belajar 9 tahun. Responden yang tidak mengetahui program wajib belajar 9 tahun tersebut adalah orang yang sudah sangat tua dan buta huruf. Mereka yang mengetahui tentang program wajib belajar 9 tahun belum tentu menyekolahkan anaknya sampai 9 tahun. Ini dapat terlihat pada tabel 9 yang menyekolahkan anaknya kurang dari 9 tahun sebanyak 48,2 persen. Hampir

seperuhnya responden yang mengetahui belum tentu melaksanakan program wajib belajar tersebut.

**Tabel 8 sosialisasi terhadap pasal 48**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	P
2.	Apakah saudara pernah mendengar sosialisasi tentang program wajib belajar tersebut?	Pernah	21	$21/24 \times 100 = 87,5\%$
		Tidak	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
	Jumlah		24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa hampir semua responden mengetahui tentang program wajib belajar 9 tahun. Terdapat 3 responden yang tidak mengetahui program wajib belajar tersebut. Sebagian besar mereka mendengar sosialisasi tersebut dari televisi. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu Saniah, “Iye, saya pernah liat di televisi. Kalo gak salah, yang diiklanin sama Rano Karno, kan?”

Hampir semua responden pernah mendengar sosialisasi tentang program wajib belajar 9 tahun tersebut dari televisi. Mungkin karena sosialisasi dari pemerintah, RT, RW, masih kurang efektif, sehingga para responden tidak pernah mendengar sosialisasi tersebut selain dari televisi. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama wawancara, semua responden mempunyai televisi. Tidak dapat dipungkiri



lagi, televisi merupakan media yang cocok untuk menyebarluaskan berita atau sosialisasi kemasyarakatan.

**Tabel 9** cakrawala terhadap pasal 48

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	P
3.	Sebelum adanya program wajib belajar 9 tahun, pemerintah hanya mewajibkan untuk sekolah 6 tahun saja. Bagaimana pandangan saudara tentang perubahan tersebut?	Kurang	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Nggak peduli	5	$5/24 \times 100 = 20,83\%$
		Dengan adanya program tersebut, orangtua akan lebih memperhatikan pendidikan anaknya	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Orangtua lebih berminat menyekolahkan anaknya	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Lebih baik 6 tahun saja	4	$4/24 \times 100 = 16,7\%$
		Lebih baik 9 tahun	1	$1/24 \times 100 = 4,17\%$
		Tidak keberatan	1	$1/24 \times 100 = 4,17\%$
		Bagus	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Senang	4	$4/24 \times 100 = 16,7\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Sebelum adanya program wajib belajar 9 tahun, program wajib belajar hanya hingga 6 tahun. Pandangan responden terhadap perubahan tersebut beraneka-ragam. Jawaban terbanyak dari responden adalah tidak peduli. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Nasapi, “Saya nggak peduli dengan adanya program wajib belajar tersebut karena bagi saya sekolah cuma semampu saya sampai berapa lama.” Disamping tidak peduli, banyak juga responden yang mengatakan bahwa wajib

belajar 6 tahun lebih baik. Ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Bentong “Kalo saya lebih setuju sekolahin anak sampai 6 tahun aje, 9 tahun kelamaan. Tetapi ada juga responden yang senang atas perubahan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Zubaedah “ Dengan adanya program wajib belajar 9 tahun mudah-mudahan aje dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena kalo cuma 6 tahun, sangat sedikit ilmu yang bisa didapat.

**Tabel 10 pendapat tentang pasal 48**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	P
4.	Bagaimana pendapat saudara tentang program wajib belajar tersebut?	Merasa terbantu	1	$1/24 \times 100 = 4,17\%$
		Masih kurang	6	$6/24 \times 100 = 25\%$
		Senang	5	$5/24 \times 100 = 20,83\%$
		Tidak suka	4	$4/24 \times 100 = 16,7\%$
		Lebih senang program wajib belajar 6 tahun	5	$5/24 \times 100 = 20,83\%$
		Bagus	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Jumlah		24

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendapat tentang wajib belajar 9 tahun adalah masih kurang. Para responden menyadari bahwa untuk jadi orang yang berhasil membutuhkan sekolah yang tidak sebentar. Agar dapat menjadi orang yang sukses, mereka harus menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Meskipun demikian, ada banyak juga yang mengatakan bahwa wajib belajar 9 tahunitu terlalu lama. Para

responden mengatakan bahwa cukup menyekolahkan anak 6 tahun saja. Ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Mahadi “ kalo saya bilang sekolah 6 tahun juga sudah cukup”. Biasanya anak yang sekolah dibawah 9 tahun atau yang sekolahnya kurang tinggi, disuru membantu orang tuanya kerja. Biasanya jaga warung.

**Tabel 11 konasi terhadap pasal 48**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	P
5.	Apakah saudara setuju dengan adanya program wajib belajar 9 tahun?	Setuju	15	$15/24 \times 100 = 62,5\%$
		Tidak setuju	9	$9/24 \times 100 = 37,5\%$
	Jumlah		24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Sebanyak 62,5% responden setuju dengan program wajib belajar tersebut dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang paling banyak dikemukakan adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Damanhuri, “Saya lebih setuju program wajib belajar 9 tahun daripada 6 tahun.” Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa orang betawi dikelurahan pesanggrahan ini, kesadaran untuk menyekolahkan anaknya sampai 9 tahun sudah cukup tinggi. Tetapi meskipun kesadarannya tinggi tidak diikuti oleh kemampuannya. Ada yang kesadarannya untuk menyekolahkan anak tinggi, tetapi tidak melaksanakannya karena tidak ada biayanya.

Tabel 12 pengalaman terhadap pasal 48

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	P
6.	Apakah saudara menyekolahkan anak hingga 9 tahun atau lebih?	Jumlah anak laki-laki	42	
		Ya, 9 tahun	3	$3/42 \times 100 = 7,14\%$
		Kurang dari 9 tahun	16	$16/42 \times 100 = 38,10\%$
		Lebih dari 9 tahun	23	$23/42 \times 100 = 54,76\%$
		Jumlah anak perempuan	24	
		Ya, 9 tahun	4	$4/24 \times 100 = 16,7\%$
		Kurang dari 9 tahun	14	$14/24 \times 100 = 58,3\%$
		Lebih dari 9 tahun	6	$6/24 \times 100 = 25\%$
		Jumlah		66

*Sumber : data hasil penelitian*

Banyak dari responden yang menyekolahkan anak perempuannya dibawah atau kurang dari 9 tahun. Sebanyak 58,3% anak perempuan yang sekolah kurang dari 9 tahun. Mereka berpendapat bahwa anak perempuan tidak perlu disekolahkan terlalu tinggi karena pada akhirnya mereka akan menikah. Dalam pandangan mereka, dalam sebuah pernikahan, lelaki-lah yang bertugas mencari nafkah sehingga anak perempuan mereka tidak perlu bekerja. Hal ini senada seperti yang diungkapkan Ibu Saniah, “Anak saya cuma saya sekolahin sampe SD. Gak lama abis lulus SD juga langsung kawin.” Berbeda dengan anak perempuan, anak laki-laki lebih banyak yang sekolah lebih dari 9 tahun. Dari hasil tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah anak

laki-laki yang sekolah lebih dari 9 tahun mencapai 54, 76%. Anak laki-laki memegang tanggung jawab yang lebih besar dari perempuan. Sehingga, anak laki-laki membutuhkan sekolah yang lebih tinggi dari anak perempuan.

**Tabel 13**pendapat tentang pasl 48

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	P
7.	Apakah menurut saudara cukup menyekolahkan anak hingga 9 tahun saja?	Cukup	11	$11/24 \times 100 = 45,83\%$
		Kurang	12	$12/24 \times 100 = 50\%$
		Tidak tahu	1	$1/24 \times 100 = 4,17\%$
	Jumlah		24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Setengah dari jumlah responden menyatakan bahwa program wajib belajar 9 tahun masih kurang. Sedangkan 45,8% mengatakan cukup, dan 4,2% sisanya tidak tahu. Responden yang menyatakan masih kurang ingin menyekolahkan anaknya lebih tinggi lagi dengan alasan bahwa di zaman sekarang, lulusan SMP masih sangat susah untuk mencari pekerjaan. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh bapak Ma'mun “ Karena zaman sekarang ini sudah banyak lulusan sarjana aja pada nganggur apalagi kalo cuma sampai SMP. Bisa-bisa anak kita ketinggalan dengan anak orang lain yang lebih tinggi pendidikannya. Terutama dalam mencari pekerjaan.”. Kemudian key informanpun membenarkan bahwa kalau menyekolahkan anak sampai 9 tahun itu masih kurang. Tetapi ada sebanyak 45,83% yang mengatakan bahwa wajib belajar 9

tahun itu juga sudah cukup. Ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Zarkasih” iya sekolah 9 tahun juga dah cukup. Percuma sekolah tinggi-tinggi kalo nantinya cuma saya suru jagain warung.” Mereka menganggap sekolah 9 tahun juga sudah cukup.

## 2. Persepsi terhadap Pasal 49

**Tabel 14** kognisi terhadap pasal 49

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Presentase
1	Apakah saudara mengetahui jika negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan?	Ya	10	$10/24 \times 100 = 41,7\%$
		Tidak	14	$14/24 \times 100 = 58,3\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber: data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hanya sebanyak 10 orang atau 41,7% yang mengetahui jika negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Jumlah ini lebih sedikit ketimbang yang tak mengetahui, yaitu sekitar 74 orang responden atau 58,3%. Para responden tidak mengetahui jika negara dan pemerintah seharusnya juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk sekolah. Mereka hanya mengetahui bahwa seharusnya orangtua-lah yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini

seperti dengan yang diungkapkan oleh Ibu Aishah, “Seharusnya orangtua yang memberikan kesempatan kepada anak untuk sekolah.”

Jadi, peran pemerintah dan negara sangat kurang dalam upaya memberikan kesempatan kepada anak untuk sekolah. Pemerintah hanya mempunyai program wajib belajar 9 tahun tetapi dalam pelaksanaannya banyak orangtua yang tidak menyekolahkan anak mereka hingga 9 tahun.

**Tabel 15 Pengalaman terhadap pasal 49**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Presentase
2	Apakah saudara memberikan kesempatan kepada anak saudara untuk sekolah?	Ya	24	$24/24 \times 100 = 100\%$
		Tidak	0	0
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Sebanyak 24 orang responden atau 100% responden memberikan kesempatan kepada anak mereka untuk sekolah. Meskipun demikian, banyak dari responden yang menyekolahkan anak mereka hanya hingga tingkat SD saja. Mereka berpendapat bahwa anak tidak perlu untuk sekolah lebih tinggi lagi karena alasan biaya. Terlebih lagi untuk anak perempuan, para orangtua beranggapan bahwa anak perempuan nantinya hanya menjadi ibu rumah tangga. Jadi, walaupun hanya hingga tingkat SMP, para orangtua sudah merasa cukup puas.

Tabel 16 Konasi terhadap pasal 49

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Presentase
3	Mengapa saudara memberikan/tidak memberikan kesempatan kepada anak saudara untuk sekolah lebih tinggi dari 9 tahun?	Karena hanya mampu membiayai anak untuk pendidikan 9 tahun saja (lagipula wajib belajar hanya 9 tahun saja)	4	$4/24 \times 100 = 16,7\%$
		Karena ingin anak mereka mampu bersaing dengan orang lain dan tidak ingin anak mereka menjadi orang bodoh	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Karena ingin anak mereka menjadi orang pintar dan berguna	8	$8/24 \times 100 = 33,3\%$
		Karena memang sudah menjadi kewajiban orangtua untuk menyekolahkan anak mereka	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Tidak ada biaya	7	$7/24 \times 100 = 29,1\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa ketika ditanya tentang alasan responden mengapa mereka memberikan kesempatan untuk menyekolahkan anak 9 tahun atau lebih, jawaban yang diberikan sangat beragam. Responden yang memberikan kesempatan anak untuk sekolah lebih dari 9 tahun ingin anaknya dapt bersaing dengan orang lain dan ingin anak mereka menjadi anak yang pintar, berguna, dan



dapat bersaing dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Ibu Fatimah, “Karena saya mau anak saya pintar dan dapat jadi orang yang berguna.” Responden yang memberikan kesempatan pada anak mereka untuk sekolah kurang dari 9 tahun sebagian besar beralasan karena tidak ada biaya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Encit, “Karena saya ngga mampu buat nyekolahkan anak lebih tinggi lagi.”

**Tabel 17 Afeksi terhadap pasal 49**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Presentase
4	Apakah saudara senang dalam menyekolahkan anak?	Ya	22	$22/24 \times 100 = 91,7\%$
		Tidak	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber data : hasil penelitian*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 22 orang responden atau sebanyak 91, 7% senang dalam menyekolahkan anak. Hanya 2 orang responden atau sebanyak 8,3% yang tidak senang dalam menyekolahkan anak. Meskipun para rsponden merasa senang dalam menyekolahkan anak, tetapi sebagian besar hanya menyekolahkan anak hingga tingkat Sekolah Dasar saja. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mawih, “Iya, saya senanglah meskipun cuma sampe SD doang.” Hal ini disebabkan kondisi ekonomi responden yang lemah. Karena alasan tiadak ada biaya itulah maka banyak responden yang menyekolahkan anak hingga tingkat Sekolah Dasar saja.

Tabel 18 pendapat terhadap pasal 49

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Presentase
5	Apakah saudara setuju jika setiap anak wajib diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh negara, pemerintah, dan keluarga untuk memperoleh pendidikan?	Tidak setuju	6	$6/24 \times 100 = 25\%$
		Setuju	18	$18/24 \times 100 = 75\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber data hasil penelitian*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 18 responden atau 75% responden setuju jika setiap anak wajib diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh negara, pemerintah, dan keluarga untuk memperoleh pendidikan. Hanya 25% responden yang tidak setuju dengan hal tersebut. Responden yang setuju beralasan bahwa seharusnya memang kewajiban orangtua untuk memberikan kesempatan anaknya dalam memperoleh pendidikan agar anak dapat mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Jahmah, “Saya setuju banget karena anak memang butuh buat disekolahkan.” Responden yang tidak setuju beranggapan bahwa untuk menyekolahkan anak terserah pada kemampuan orangtua masing-masing. Jika kemampuan mereka hanya hingga tingkat sekolah dasar maka tidak akan diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

### 3. Persepsi terhadap Pasal 50

**Tabel 19 pengalaman terhadap pasal 50**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
1	Apakah dengan sekolah anak saudara mengalami perubahan dalam perkembangan sikap, bakat, rasa hormat terhadap orangtua, identitas budaya, dan rasa hormat, dan cinta terhadap lingkungan hidup?	Tidak tahu	6	$6/24 \times 100 = 25\%$
		Ya	5	$5/24 \times 100 = 20,9\%$
		Tidak	13	$13/24 \times 100 = 54,1\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 13 orang responden atau sebanyak 54,1% responden menyatakan bahwa anaknya tidak mengalami perubahan dalam pengembangan sikap, bakat, rasa hormat terhadap orangtua, identitas budaya, dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup setelah disekolahkan. Hal itu mungkin terjadi karena sang anak hanya disekolahkan hingga tingkat SD saja sehingga belum dapat terlihat perkembangannya. Sedangkan 6 orang responden tidak mengetahui apakah anak mereka mengalami perubahan dalam pengembangan sikap, bakat, rasa hormat terhadap orangtua, identitas budaya, dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zarkasih, “Kayaknya engga deh, maklum cuma sampe SD.” Hanya 5 orang responden yang mengetahui bahwa dengan bersekolah anak mereka mengalami perubahan dalam pengembangan sikap, bakat, rasa hormat terhadap

orangtua, identitas budaya, dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

**Tabel 20** kognisi terhadap pasal 50

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
1	Apakah saudara mengetahui bahwa tujuan pendidikan adalah agar setiap anak diarahkan pada pengembangan sikap, pengembangan atas HAM, rasa hormat terhadap budaya,	Tidak tahu	21	$21/24 \times 100 = 87,5\%$
		Tahu	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 21 orang responden atau sebanyak 87,5% responden tidak mengetahui bahwa tujuan pendidikan adalah setiap anak diarahkan pada pengembangan sikap, pengembangan atas HAM, rasa hormat terhadap budaya, dan pengembangan rasa hormat pada orangtua. Hanya 3 orang responden atau hanya 12,5% responden yang mengetahui tujuan pendidikan tersebut. Para responden lebih banyak menyekolahkan anak mereka agar menjadi pintar dan dapat mencari pekerjaan yang layak dan ada pula yang beralasan hanya agar dapat membaca, menulis, dan membaca Al Qur'an. Maka dari itu banyak yang menyekolahkan anak mereka hanya hingga tingkat SD saja karena mereka menilai hal tersebut sudah cukup. Sedangkan mereka yang mengetahui adalah mereka yang berpendidikan tinggi.

**Tabel 21 Konasi terhadap pasal 50**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
2	Apakah saudara setuju dengan tujuan pendidikan tersebut?	Setuju	18	$18/24 \times 100 = 75\%$
		Tidak setuju	6	$6/24 \times 100 = 25\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 18 orang responden atau sebanyak 75% responden setuju kepada tujuan pendidikan tersebut. Hanya sebanyak 6 orang responden atau 25% responden saja yang tidak setuju. Responden yang setuju beralasan bahwa selama tujuan pendidikan tersebut memang bagus untuk anak, maka mereka akan setuju saja. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khairullah, “ Saya setuju aja asal tujuan tersebut memang bagus buat anak saya.” Sedangkan responden yang tidak setuju berpendapat bahwa tujuan pendidikan janganlah terlalu tinggi. Bisa membaca dan menulis saja sudah cukup bagi mereka.

**Tabel 22 cakrawala terhadap pasal 50**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
3	Apa pandangan saudara terhadap tujuan pendidikan yang saudara lakukan pada anak saudara?	Agar anak dapat pekerjaan yang layak dan bisa hidup mandiri	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Agar pintar dan bisa mencari kerja	3	$3/24 \times 100 = 12,4\%$
		Agar pintar dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara	4	$4/24 \times 100 = 16,7\%$
		Agar pintar dan bisa baca-tulis	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Agar bisa baca dan mengaji	8	$8/24 \times 100 = 33,3\%$
		Agar dapat mengembangkan potensi yang ada dan dapat berguna bagi semua	4	$4/24 \times 100 = 16,7\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa ketika responden ditanyakan tentang pandangan tujuan pendidikan yang diterapkan pada anaknya, jawabannya sangat beragam. Jawaban yang paling banyak yaitu sebanyak 33,3% adalah agar bisa baca-tulis dan membaca Al Qur'an. Bagi masyarakat Betawi, dapat membaca Al Qur'an merupakan sesuatu yang harus bisa dilakukan. Oleh karena itu banyak muncul pengajian-pengajaran di mishola yang diasuh oleh para ulama atau ustad setempat.

Karena pelajaran agama disekolah dinilai sangat kurang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Zamilah, “Bagi saya tujuan menyekolahkan anak agar anak saya pintar aja ama bisa baca-tulis. Saya juga mau anak saya bisa ngaji. Makanya selain sekolah, anak saya ikut mengaji juga di mushola dekat rumah.” Selain itu ada 16,7% responden atau sebanyak 4 responden yang menjawab agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri anaknya.

#### 4. Persepsi terhadap Pasal 51

**Tabel 23** pengalamam terhadap pasal 51

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
1	Apakah saudara mempunyai anak yang cacat?	Ya	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Tidak	22	$22/24 \times 100 = 91,7\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, hanya dua orang responden atau sebanyak 8,3% yang mempunyai anak yang cacat. Sebanyak 22 orang responden atau sebanyak 91,7% tidak mempunyai anak yang cacat. Anak responden yang cacat tersebut bukan merupakan cact dari lahir, tetapi dikarenakan pengaruh ilmu tenaga dalam dan narkoba sehingga syaraf-syaraf otak mereka menjadi terganggu. Sayangnya kedua anak tersebut tidak diusahakan untuk disembuhkan atau diterapi agar dapt kembali normal seperti semula. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan ekonomi kedua

orangtua mereka. Menurut data yang didapat penulis dari kelurahan tersebut, memang hanya ada 6 orang tunanetra dan 2 orang tunarungu. Tidak ada penderita gangguan

**Tabel 24 Kognisi terhadap pasal 51**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
2	Jika punya, apakah saudara akan menyekolahkanya?	Ya	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Tidak	21	$21/24 \times 100 = 87,5\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jika responden mempunyai anak yang cacat, hanya ada 3 orang responden atau sebanyak 12,5% yang mau menyekolahkanya. Lebih banyak yang tidak mau menyekolahkan anak cacat yaitu sebanyak 21 orang responden atau sebanyak 87,5%. Padahal kenyataannya, anak yang terlahir cact membutuhkan pendidikan khusus agar dapt hidup secara mandiri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Anak yang terlahir normal saja membutuhkan pendidikan agar dapat hidup mandiri dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

**Tabel 25 konasi terhadap pasal 51**



No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
3	Mengapa saudara memberikan atau tidak memberikan kesempatan pada anak yang cacat untuk sekolah?	Percuma	9	$9/24 \times 100 = 37,5\%$
		Biaya yang mahal	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Lebih baik diurus di rumah	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Merepotkan	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Tidak bisa mencari kerja	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Karena anak yang normal saja butuh sekolah, apalagi anak yang cacat	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Tidak tahu dimana sekolah untuk anak cacat	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa alasan untuk tidak memberikan kesempatan anak yang cacat untuk memperoleh pendidikan adalah percuma saja disekolahkan sebanyak 9 orang responden atau 37,5%. Alasan selanjutnya adalah biaya yang mahal dan tidak tahu mau menyekolahkan kemana. Sebanyak masing-masing 3 orang responden atau sebanyak 12,5%. Alasan lain adalah lebih baik diurus di rumah, tidak bisa mencari pekerjaan, dan karena hanya merepotkan saja masing-masing sebanyak 2 orang responden atau sebanyak 8,3%. Meskipun banyak yang tidak mau menyekolahkan jika mempunyai anak yang cacat, ada juga yang menjawab

akan menyekolahkan jika mereka mempunyai anak yang cacat. Sebanyak 3 orang responden yang akan menyekolahkan anak mereka meskipun jika anaknya cacat.

Alasannya adalah karena anak yang normal saja membutuhkan institusi selah untuk mengembangkan potensinya, apalagi anak yang cacat. Anak cacat membutuhkan sekolah khusus agar dapat hidup secara mandiri dan tidak merepotkan keluarga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh key informan, “Karena anak yang normal saja membutuhkan sekolah untuk mengembangkan dirinya, apalagi anak yang cacat. Justru, mereka lebih membutuhkan pendidikan (sekolah) agar dapat hidup secara mandiri dan agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya.”

## 5. Persepsi terhadap Pasal 52

**Tabel 26 Pengalaman terhadap pasal 52**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
1	Apakah saudara mempunyai anak yang memiliki keunggulan atau anak yang sangat pintar?	Ya	0	$0/24 \times 100 = 0\%$
		Tidak	24	$24/24 \times 100 = 100\%$
		Tidak tahu	0	$0/24 \times 100 = 0\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua responden tidak mempunyai anak yang memiliki keunggulan atau anak yang sangat pintar. Memang ada beberapa anak responden yang pintar, tetapi masih dalam taraf yang normal. Sekolah mereka

pun masih sekolah umum, bukan sekolah khusus khusus atau kelas akselerasi. Sebagai informasi, di Kelurahan Pesanggrahan memang tidak terdapat sekolah khusus atau kelas akselerasi sehingga meskipun anak tersebut sangat pintar, orangtua tidak tahu bahwa ada sekolah untuk anak yang memiliki keunggulan dan hanya menyekolahkan di sekolah umum saja. Hasilnya tentu saja anak tersebut tidak berkembang secara optimal.

**Tabel 27 Afeksi terhadap pasal 52**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
2	Jika punya, apakah saudara menyekolahkan pada sekolah atau kelas khusus (akselerasi)?	Ya	2	$2/24 \times 100 = 8,3\%$
		Tidak	22	$22/24 \times 100 = 91,4\%$
		Tidak tahu	0	$0/24 \times 100 = 0\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 22 orang responden atau 91,4% responden berpendapat jika mempunyai anak yang memiliki keunggulan tidak akan menyekolahkan pada sekolah khusus atau kelas akselerasi. Banyak responden yang tidak mengetahui bahwa terdapat sekolah semacam itu. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Mu'im, "Nggak tau dah. Saya aja baru denger kalo ada sekolah kaya gitu." Selain dari alasan tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa sekolah umum saja sudah mahal, apalagi sekolah khusus semacam itu. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Tihamah, "Sekolah umum aja udah mahal, apalagi sekolah

model yang kaya gitu.” Meskipun demikian ada pula responden yang berpendapat akan menyekolahkan anaknya di sekolah khusus jika anak tersebut memang memiliki keunggulan dibandingkan dengan anak yang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zamilah, “Karena memang anak yang memiliki keunggulan harus sekolah atau kelas akselerasi agar dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal.”

**Tabel 28 Konasi terhadap pasal 52**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
3	Apakah saudara setuju bila anak saudara yang memiliki keunggulan untuk disekolahkan pada sekolah khusus/kelas akselerasi?	Ya	7	$7/24 \times 100 = 29,2\%$
		Tidak	17	$17/24 \times 100 = 70,8\%$
		Tidak tahu	0	$0/24 \times 100 = 0\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ketika diberikan pertanyaan mengenai setuju atau tidak jika anak yang memiliki keunggulan untuk disekolahkan di sekolah khusus atau kelas akselerasi, sebanyak 29,2% atau sebanyak 7 orang responden menjawab setuju. Alasannya adalah jika memang anak tersebut sangat pintar atau memiliki keunggulan dan orangtuanya mampu, maka sekolah akselerasi memang tempat yang cocok. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mahadi, “Ya, asaya setuju asal anaknya mampu dan orangtuanya juga mampu

membiaiyainya.” Sedangkan sebanyak 17 orang responden atau sebanyak 70,8% tidak setuju jika anak yang memiliki keunggulan untuk disekolahkan di sekolah khusus atau kelas akselerasi. Mereka beranggapan bahwa sekolah tersebut pasti lebih mahal dari sekolah umum. Pada kenyataannya, anak yang memiliki keunggulan memang membutuhkan sekolah khusus atau kelas akselerasi agar dapat berkembang secara lebih optimal. Alasan mereka seperti yang diungkapkan oleh Bapak Safari, “Mendingan sekolah biasa aja. Sekolah biasa aja bayarnya udah mahal, apalagi sekolah khusus.”

**Tabel 29 Cakrawala terhadap pasal 52**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
4	Apa pandangan saudara tentang anak yang memiliki keunggulan yang disekolahkan pada sekolah khusus/kelas akselerasi?	Tidak masalah sepanjang orangtuanya mampu	5	$5/24 \times 100 = 20,8\%$
		Terserah kemampuan dan kemauan anak	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Memang sudah seharusnya	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Terlalu berlebihan	5	$5/24 \times 100 = 20,8\%$
		Lebih baik sekolah umum saja	4	$4/24 \times 100 = 16,7\%$
		Memang sudah sewajarnya	1	$1/24 \times 100 = 4,1\%$
		Tidak tahu	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Jumlah	24	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jawaban dari responden sangat beragam ketika ditanya bagaimana pandangan mereka tentang anak yang memiliki keunggulan untuk disekolahkan pada sekolah khusus. Sebanyak 5 orang responden atau sebanyak 20,8% menjawab tidak masalah sepanjang orangtua mereka mereka. Memang sekolah khusus seperti itu membutuhkan biaya yang lebih besar dari sekolah umum. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Damanhuri, “Ya itu sih terserah orangtuanya. Jika mereka mampu dan anaknya juga mau ya nggak apa-apa.”

Sebanyak 3 orang responden atau sebanyak 12,5% menjawab terserah kemauan dan kemampuan anak. Hal ini tergambar dari pendapat Bapak Mawih, “Ya nggak masalah asal orangtuanya mampu dan anaknya mau.” Tetapi ada sebanyak 5 orang responden atau sebanyak 20,8% yang menjawab bahwa terlalu berlebihan jika anak yang memiliki keunggulan disekolahkan di sekolah khusus. Menurut mereka sekolah umum saja sudah cukup. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bentong, “Terlalu berlebihan kalo anak yang pintar disekolahkan di sekolah khusus. Sekolah umum aja udah cukup kok.”

## 6. Persepsi terhadap Pasal 53

**Tabel 30 Kognisi terhadap pasal 53**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
1	Apakah saudara mengetahui bahwa pemerintah membebaskan biaya pendidikan hingga 9 tahun?	Iya	24	$24/24 \times 100 = 100\%$
		Tidak	0	$0/24 \times 100 = 0\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua responden mengetahui bahwa pemerintah membebaskan biaya pendidikan hingga 9 tahun karena memang hingga tingkat SMP anak mereka tidak dikenakan biaya SPP. Di sekolah juga terpampang poster-poster yang menginformasikan tentang sekolah gratis. Dengan demikian, semua responden mengetahui bahwa pemerintah membebaskan biaya sekoah hingga 9 tahun. Hal ini juga dapt terlihat dari banyaknya jumlah lulusan SLTP yang mencapai 8.590 orang. Jumlah ini merupakan jumlah lulusan terbanyak.

**Tabel 31 Sosialisasi terhadap pasal 53**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
2	Apakah pernah ada dorongan atau sosialisasi dari RT, RW, atau pemerintah untuk menyekolahkan semua anak termasuk dari keluarga yang kurang mampu dan anak terlantar untuk sekolah?	Pernah	8	$8/24 \times 100 = 33,3\%$
		Tidak pernah	16	$16/24 \times 100 = 66,7\%$
		Jumlah	24	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 8 orang responden atau 33,3% mengetahui dari RT, RW, atau pemerintah untuk menyekolahkan semua anak termasuk dari keluarga yang kurang mampu dan anak terlantar utuk sekolah. Sebanyak 16 orang responden atau sekitar 66,7%responden tidak mengetahui hal tersebut. Meskipun responden mengetahui bahwa pernah ada dorongan atau sosialisasi dari RT, RW, Pemerintah untuk menyekolahkan anak, tetapi ada yang

tidak peduli dengan dorongan tersebut. Mereka beranggapan bahwa pemerintah tidak perlu mengatur anak mereka untuk sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tihamah, “Iya dulu pernah ada dari kelurahan. Katanya orangtua wajib menyekolahkan anak sampe SMP. Tapi saya masa bodo amat.”

**Tabel 32 Konasi terhadap pasal 53**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
3	Apakah saudara setuju jika semua anak dibantu oleh pemerintah dalam membiayai sekolah anak?	Setuju	24	$24/24 \times 100 = 100\%$
		Tidak setuju	0	$0/24 \times 100 = 0\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua responden atau sebanyak 24 responden menjawab setuju jika semua anak dibantu oleh pemerintah dalam membiayai sekolah anaknya. Para responden merasa terbantu apabila pemerintah membantu dalam membiayai sekolah anaknya. Apalagi dengan keadaan ekonomi mereka yang sulit. Dengan demikian diharapkan para orangtua akan menyekolahkan anaknya meskipun keadaan ekonomi mereka lemah sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berhasil dengan baik.

**Tabel 33 Afeksi terhadap pasal 53**



No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
4	Apakah saudara senang anak saudara tidak dikenakan biaya SPP hingga 9 tahun?	Senang	24	$24/24 \times 100 = 100\%$
		Tidak senang	0	$0/24 \times 100 = 0\%$
		Jumlah	24	100%

*Sumber : data hasil penelitian*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua responden atau sebanyak 24 orang responden merasa senang tidak dikenakan biaya SPP hingga 9 tahun sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk sekolah anaknya. Bahkan ada juga responden yang mengharapkan agar semua biaya sekolah anak ditanggung oleh pemerintah.

**Tabel 34 Pengalaman terhadap pasal 53**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
5	Selain SPP, biaya apalagi yang harus saudara keluarkan untuk sekolah?	Uang saku, seragam, dan buku	13	$13/24 \times 100 = 54,1\%$
		Uang saku dan buku	1	$1/24 \times 100 = 4,1\%$
		Uang saku, buku, dan olahraga	7	$7/24 \times 100 = 29,1\%$
		Uang saku, buku, perpisahan, dan sumbangan-sumbangan	3	$3/24 \times 100 = 12,5\%$
		Jumlah	24	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa masih banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh orangtua untuk biaya sekolah anaknya. Sebanyak 13 orang responden atau sebanyak 54,1% menjawab bahwa diluar SPP, mereka masih harus mengeluarkan uang untuk uang saku, seragam, dan buku. Selanjutnya, 7 orang responden atau sebanyak 29,1% menjawab bahwa uang yang dikeluarkan adalah untuk uang saku, buku, dan olahraga. Lalu, sebanyak 3 orang responden atau sebanyak 12,5% menjawab untuk uang saku, buku, perpindahan, dan sumbangan-sumbangan. Melihat jawaban-jawaban diatas, semua responden masih mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk sekolah anak mereka. Hal ini tergambar dar jawaban yang diberikan oleh Bapak Mahadi, “Wah banyak, buat beli seragam, buku, pensil, pulpen.” Agar orang tua lebih berminat menyekolahkan anaknya, pemerintah diharapkan memfasilitasi pendidikan yang tidak hanya murah, tetapi juga berkualitas.

## 7. Persepsi terhadap Pasal 54

**Tabel 35**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
1	Apakah anak saudara pernah mengalami tindak kekerasan di sekolah?	Pernah	6	$6/24 \times 100 = 25\%$
		Tidak pernah	18	$18/24 \times 100 = 75\%$
		Jumlah	24	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 6 orang responden atau sebanyak 25% responden mengatakan bahwa anak mereka pernah mengalami tindak kekerasan di sekolah. Tetapi tidak ada satupun kasus tindak kekerasan yang dilakukan

oleh guru atau karyawan sekolah. Semua tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh sesama siswa. Mereka beralasan bahwa masih dalam tahap yang wajar jika terjadi perselisihan di sekolah mengingat usia mereka yang masih tergolong anak-anak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Oom, “Iya, kalo cuman beratem doang sih udah pernah. Maklumlah namanya juga masih anak-anak.” Sebanyak 18 orang responden atau sebanyak 75% orang responden mengatakan bahwa anak mereka tidak pernah mengalami tindak kekerasan di sekolah.

**Tabel 36**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
2	Apakah saudara mengetahui jika anak saudara wajib diberikan perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, maupun teman-temannya?	Ya	0	$0/24 \times 100 = 0\%$
		Tidak	24	$24/24 \times 100 = 100\%$
		Jumlah	24	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 24 orang responden atau 100% responden tidak mengetahui jika anak mereka wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, maupun teman-temannya. Hal itu mungkin terjadi karena banyak dari anak responden yang tidak pernah mengalami tinadak kekerasan di sekolah. Faktor lain mungkin karena tidak pernah adanya sosialisasi tentang perlindungan anak sehingga mereka tidak mengetahui bahwa anaknya wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang terjadi

di sekolahnya. Pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mensosialisasikan hal tersebut.

**Tabel 37**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
3	Apakah saudara setuju jika anak saudara mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan di sekolahnya?	Setuju	24	$24/24 \times 100 = 100\%$
		Tidak setuju	0	$0/24 \times 100 = 0\%$
		Jumlah	24	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 24 orang responden atau 100% responden setuju jika anaknya mendapatkan perlindungan dari tinadak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, maupun teman-temannya. Jadi, jika anak mereka dilindungi diselahnnya, mereka akan merasa lebih tenang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kamah, “Iya, saya setuju banget, jadi saya tenang dirumah waktu anak saya sekolah.” Dengan adanya perlindungan di sekolah, diharapkan agar anak dapat belajar dengan tenang dan dapat berhasil di bidang akademiknya.

**Tabel 38**

No.	Pertanyaan	Jawaban	F	Persentase
4	Apakah saudara senang jika anak saudara mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang terjadi di sekolah?	Senang	24	$24/24 \times 100 = 100\%$
		Tidak senang	0	$0/24 \times 100 = 0\%$
		Jumlah	24	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 24 orang responden atau sebanyak 100% responden senang jika anaknya mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang terjadi di sekolah sehingga mereka tidak akan khawatir bila anak mereka sedang berada di sekolah. Menurut key informan, sekolah adalah tempat yang bebas dari tindak kekerasan agar anak dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Jadi setiap orang tua pastinya senang jika setiap anaknya mendapatkan perlindungan disekolahnya.

## 5. Pembahasan

Persepsi masyarakat Betawi dikelurahan Pesanggrahan untuk melaksanakan pasal 48 masih buruk, terutama untuk anak perempuannya. Padahal pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun untuk semua anak Indonesia. Dari data yang diperoleh, sebanyak 58,3 persen anak perempuan hanya menempuh pendidikan kurang dari 9 tahun. Para responden beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu untuk sekolah terlalu tinggi, karena nantinya hanya mengurus urusan rumah tangga saja. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Nasapi. Beliau mengatakan, "Untuk apa sekolah tinggi tinggi kalo nanti kerjanya cuma di dapur". Berbeda dengan anak perempuan, pendidikan anak laki-laki pada masyarakat Betawi dikelurahan

Pesanggrahan ini sudah cukup tinggi. Ini terbukti dari data sebanyak 54,76 persen anak laki-laki responden mendapatkan pendidikan lebih dari 9 tahun. Mungkin karena anak laki-laki memegang peranan yang penting jika nantinya mereka berkeluarga. Anak laki-lakilah yang berperan sebagai kepala rumah tangga dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, maka anak laki-laki secara otomatis membutuhkan pendidikan lebih tinggi daripada anak perempuan agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara baik. Secara umum pendidikan anak pada masyarakat Betawi dikelurahan Pesanggrahan masih rendah. Ini terbukti dari data monografi kelurahan Pesanggrahan menunjukkan bahwa jumlah lulusan Sekolah Dasar mencapai 4.217 anak dan lulusan SLTP sebanyak 8.590 anak. Menurut hasil wawancara dengan Tokoh Betawi Kecamatan Kebayoran Lama, daerah Pesanggrahan memang dari sejak zaman Belanda sudah berpandangan buruk pada pendidikan formal. Beliau mengatakan bahwa “daerah Pesanggrahan memang dari sejak zaman Belanda sudah begitu. Mungkin karena doktrin dari Belanda yang mengatakan bahwa jangan sekolah tinggi-tinggi, dunia ini kecil. Mendingan urusin aje urusan akherat (agama), dan sekolah formal kan datangnya dari barat, jadi mereka takut pengaruhnya buruk bagi anak mereka.

Persepsi Masyarakat Betawi terhadap pelaksanaan pasal 49 sudah cukup baik. Dari data yang diperoleh, 100 persen responden memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan. Walaupun banyak yang hanya sekolah sampai SD saja, tetapi rata-rata anak responden sudah dapat membaca, menulis, serta membaca Al Quran. Karena selain sekolah, banyak terdapat pengajian-

pengajian yang diikuti oleh anak-anak responden. Menurut data monografi Kelurahan Pesanggrahan, terdapat 38 Majelis Taklim di Kelurahan Pesanggrahan ini. Ini membuktikan bahwa selain sekolah formal, masyarakat Betawi di Kelurahan Pesanggrahan ini juga memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh ilmu agama. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Mawih. Ia mengatakan, “Selain sekolah, anak saya ikut pengajian dekat rumah”. Jadi sekolah hingga SD saja juga sudah cukup. Karena sudah bisa membaca dan menulis. Sedangkan agar dapat membaca Al Quran, rata-rata anak responden mengikuti pengajian atau Majelis Taklim. Para responden beranggapan bahwa pendidikan agama di sekolah umum masih kurang. Jadi mengikuti pengajian merupakan kewajiban bagi anak mereka.

Persepsi masyarakat Betawi di Kelurahan Pesanggrahan terhadap pasal 50 masih buruk. Dari data yang diperoleh, sebanyak 87,5 persen responden tidak mengetahui bahwa tujuan pendidikan diarahkan pada pengembangan sikap, pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia, pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. Sebagian besar responden beranggapan bahwa tujuan dari pendidikan adalah agar bisa membaca, menulis serta membaca Al Quran. Oleh karena itu bagi responden menyekolahkan anak sampai Sekolah Dasar saja sudah cukup. Meskipun mereka tidak mengetahui tujuan pendidikan tersebut, tetapi jika tujuan tersebut memang bagus untuk anak maka mereka berpendapat bahwa mereka setuju saja. Dari data diperoleh 75 persen responden setuju tentang tujuan pendidikan tersebut. Ini

sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Aisah. Ia mengatakan bahwa “Iya saya setuju aja, asal tujuan tersebut bagus”. Pada dasarnya, memang tujuan tersebut sangat bagus untuk anak-anak.

Apabila masyarakat Betawi dikelurahan Pesanggrahan mempunyai anak yang cacat, baik fisik maupun mental sebagian besar tidak anak menyekolahkanya. Ini berarti persepsi masyarakat Betawi terhadap pasal 51 ini masih buruk. Dari data yang berhasil penulis peroleh, sebanyak 87,5 persen masyarakat Betawi dikelurahan Pesanggrahan ini tidak akan menyekolahkan anaknya, jika anak tersebut cacat. Mereka beralasan bahwa percuma saja jika anak tersebut disekolahkan karena hanya akan merepotkan saja. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Jahmah, Ia mengatakan, “Percuma aja disekolahin.” Untung saja berdasarkan data yang penulis peroleh, hanya 2 orang responden yang mempunyai anak yang cacat. Itupun bukan cacat dari lahir, melainkan cacat mental karena narkoba dan akibat ilmu tenaga dalam. Menurut data monografi Kelurahan Pesanggrahan hanya terdapat 6 orang tuna netra dan 2 orang tuna rungu. Padahal seharusnya anak yang cacat lebih membutuhkan pendidikan daripada anak yang normal. Anak yang cacat membutuhkan pendidikan yang khusus agar mereka dapat hidup mandiri seperti layaknya anak yang normal. Memang tidak ada sekolah khusus untuk anak cacat dikelurahan Pesanggrahan ini. Tetapi masih banyak sekolah untuk anak cacat ditempat lain.

Dari data yang didapat, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Betawi di Kelurahan Pesanggrahan terhadap pasal 52 masih buruk. Sebanyak 70,8



persen responden tidak setuju jika mempunyai anak yang memiliki keunggulan untuk disekolahkan disekolah khusus atau pada kelas akselerasi. Memang dari data yang penulis dapat dari lapangan, semua responden tidak memiliki anak yang sangat pintar atau anak yang memiliki keunggulan. Dari data monografi Kelurahan Pesanggrahan juga tidak tercatat adanya anak yang memiliki keunggulan. Tetapi jika mereka mempunyai anak yang memiliki keunggulan juga hanya akan menyekolahkan di sekolah umum saja. Mereka beranggapan bahwa sekolah umum saja sudah mahal, apalagi sekolah khusus atau kelas akselerasi. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Wardah. Ia mengatakan, “Sekolah biasa aja dah mahal apalagi sekolah kaya gitu”. Padahal seharusnya anak yang memiliki keunggulan atau anak yang sangat pintar membutuhkan pendidikan yang khusus agar dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan key informan, yaitu bapak Drs. Sauji Ismail M.Si. Beliau mengatakan, “Anak yang pintar memang membutuhkan sekolah yang khusus agar dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal”. Tetapi sebagian besar dari masyarakat Betawi di Kelurahan Pesanggrahan ini tidak berpendapat demikian. Mereka beranggapan bahwa sekolah biasa saja juga sudah cukup untuk anak mereka. Seharusnya anak yang memiliki keunggulan disekolahkan di sekolah khusus.

Dari data yang penulis dapat dari lapangan, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Betawi terhadap pasal pasal 53 sudah baik. Ini terlihat dari 100 persen responden yang mengetahui bahwa pemerintah membebaskan biaya pendidikan sampai 9 tahun dan masing-masing 100 persen responden mengatakan

senang dan setuju bila biaya pendidikan anak mereka dibantu oleh pemerintah. Memang setiap orang tua pasti setuju dan senang jika anaknya dibantu biaya untuk sekolah karena keadaan ekonomi mereka yang serba pas-pasan. Jangankan untuk sekolah, untuk makan saja masih ada yang sulit. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, diharapkan agar semua orang tua menyekolahkan anak lebih tinggi lagi. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Nur Ali, beliau mengatakan, “Ya saya setuju banget. Paling ngga bisa mengurangi beban biaya yang harus saya keluarin untuk sekolah anak.” Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini, diharapkan semua anak Indonesia terutama anak Betawi dapat menikmati pendidikan gratis minimal sampai 9 tahun. Dari data monografi Kelurahan Pesanggrahan dapat terlihat bahwa memang jumlah lulusan SLTP menempati urutan terbanyak, yaitu sebanyak 8.590 anak. Diharapkan pemerintah agar membuat program wajib belajar yang lebih tinggi lagi, sehingga banyak anak yang dapat memperoleh pendidikan lebih tinggi.

Persepsi masyarakat Betawi di Kelurahan Pesanggrahan terhadap pasal 54 cukup baik. Ini terlihat dari data sebanyak 75 persen tidak pernah mengalami tindak kekerasan yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh guru, karyawan sekolah, maupun teman-temannya. Lalu sebanyak 100 persen responden setuju dan senang jika anak mereka mendapatkan perlindungan di sekolahnya. Hanya 25 persen anak responden yang pernah mengalami tindak kekerasan di sekolah. Itupun hanya terjadi perkelahian sesama anak-anak. Tidak pernah ada anak dari responden yang mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru dan karyawan sekolah.

Memang seharusnya sekolah adalah tempat yang bebas dari segala tindak kekerasan, agar para siswa dapat belajar dengan nyaman. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Rojali. Beliau mengatakan, “Saya setuju banget jika anak saya dilindungi disekolahnya, agar anak belajarnya tenang karena merasa aman dilindungi.” Jadi apabila anak mendapatkan perlindungan disekolahnya, diharapkan anak tersebut dapat belajar dengan nyaman dan dapat prestasi yang baik sehingga anak tersebut dapat menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.

#### **D. Keterbatasan Studi**

Penelitian ini mengalami banyak kesulitan karena, luasnya lokasi penelitian, waktu yang terbatas, dan responden yang kurang senang pada waktu ditanyakan tentang sekolah anaknya. Karena mereka berpendapat bahwa peneliti terlalu mencampuri urusan mereka.

Kemudian penelitian yang semula direncanakan di Kelurahan Cipulir, ternyata berganti lokasi menjadi Kelurahan Pesanggrahan. Alasan yang melandasi terjadinya kepindahan ini adalah karena peneliti menghindari subjektifitas karena peneliti tinggal di Kelurahan Cipulir. Kelurahan Pesanggrahan dipilih karena masih banyak terdapat masyarakat Betawi yang tinggal di kelurahan tersebut. Penelitian yang

dilakukan adalah Persepsi Masyarakat Betawi terhadap Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2002 pasal 48-54 tentang pendidikan anak.

Begitu luasnya kajian tentang masyarakat dan UU No. 3 tahun 2002, karena itu peneliti hanya berfokus pada persepsi masyarakat Betawi terhadap pasal 48-54. Peneliti menyadari bahwa dalam prosesnya, penelitian ini mengalami banyak kendala di lapangan. Pertama, karena jumlah penduduk yang banyak, peneliti harus membatasi jumlah informan. Kedua, karena responden yang akan diteliti direkomendasikan oleh Ketua RW, peneliti tidak dapat memilih sampel yang peneliti inginkan.